

# Peningkatan profesionalisme guru akuntansi pada kompetensi dasar memahami akuntansi lembaga

Eka Rahmawati\*, Amir Mahmud, & Nurdian Susilowati

Universitas Negeri Semarang

\* [amirmahmud@mail.unnes.ac.id](mailto:amirmahmud@mail.unnes.ac.id)

**Abstrak.** Salah satu kompetensi dasar yang baru dalam Kurikulum 2013 revisi adalah Memahami pengelolaan keuangan desa. Kompetensi dasar memahami pengelolaan keuangan desa menjadi urgen dipelajari karena pengetahuan baru dalam bidang akuntansi. Oleh sebab itu, guru harus bergerak untuk belajar dari berbagai macam sumber tidak terkecuali dari para akademisi. Tujuan kegiatan pengabdian ini yaitu meningkatkan pemahaman ruang lingkup pengelolaan keuangan desa dan pemahama kegiatan pemerolehan pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa. Selanjutnya dilakukan evaluasi pelatihan secara komprehensif sehingga dapat menyusun laporan kekayaan milik desa. Kegiatan pelatihan diikuti oleh 80 guru akuntansi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Pemalang dengan virtual menggunakan zoom meeting. Hasilnya adalah guru dapat memahami ruang lingkup pengelolaan keuangan desa dan fungsinya. Konsep pendapatan, belanja, dan pembiayaan dengan teliti dapat dipahami dan dipraktikkan cara penerapannya. Basis akuntansi yang digunakan adalah basis kas, sehingga selama ini pencatatan keuangannya masih sangat sederhana.

**Kata kunci:** APBDes; guru akuntansi; keuangan desa; kompetensi professional

**Abstract.** One of the new essential competencies in the revised 2013 Curriculum is understanding village financial management. Basic competence to understand village financial management is urgent to learn because of new knowledge in accounting. Therefore, teachers must move to learn from various sources, including academics. This community service activity aims to increase understanding of the scope of village financial management and knowledge of income, expenditure, and village financing activities. Furthermore, a comprehensive evaluation of the training is carried out to compile reports on village assets. The training activity was attended by 80 vocational high schools (SMK) accounting teachers in Pemalang using virtual zoom meetings. The result is that teachers can understand the scope of village financial management and its functions. The concepts of income, expenditure and financing can be carefully understood and practised how to apply them. The accounting basis used is the cash basis, so that so far, the financial records are still straightforward.

**Keywords:** village budget; accounting teacher; village finance; professional competency

---

*To cite this article:* Rahmawati, E., A. Mahmud., & N. Susilowati. 2021. Peningkatan profesionalisme guru akuntansi pada kompetensi dasar memahami akuntansi lembaga. *Unri Conference Series: Community Engagement* 3: 351-357. <https://doi.org/10.31258/unricsce.3.351-357>

© 2021 Authors

Peer-review under responsibility of the organizing committee of Seminar Nasional Pemberdayaan Masyarakat 2021

---

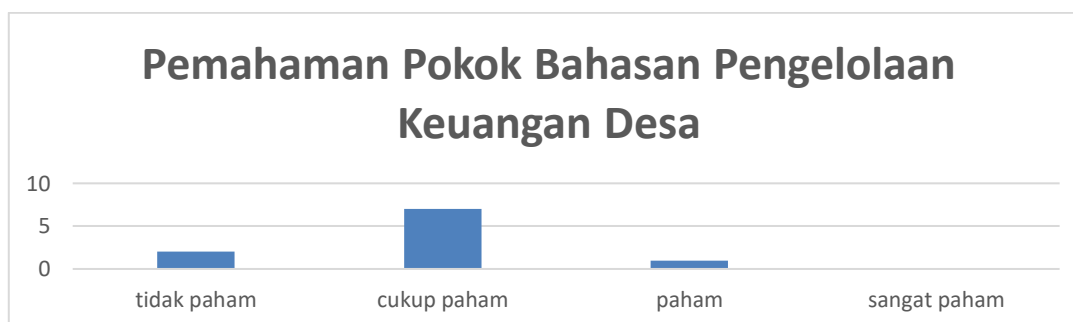
## PENDAHULUAN

Implementasi kompetensi professional adalah update pengetahuan dan materi yang dilakukan oleh pendidik sehingga kompetensi yang diajarkan sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman. Tahun 2017 merupakan kebangkitan kurikulum 2013 yakni dengan ditetapkannya penerapan kurikulum 2013 revisi. Salah satu perbedaan kurikulum 2013 dengan kurikulum 2013 revisi adalah pada kompetensi inti. Kompetensi Inti (KI) adalah deskripsi secara spesifik mengenai sikap, pengetahuan, dan ketrampilan (kognitif dan psikomotor) yang harus dikuasai oleh siswa (Susilowati, N., dan Santoso, 2019). Artinya setiap siswa dituntut menguasai sejumlah kemampuan sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara aktif dalam proses belajar mengajar.

Salah satu kompetensi dasar terbaru sesuai Kurikulum 2013 revisi adalah memahami pengelolaan keuangan desa yang secara efektif diajarkan pada tahun 2020 di kelas XI. Adanya pengetahuan dan ilmu baru mendorong pendidik/guru melakukan eksplorasi materi dalam berbagai macam sumber. Akan tetapi banyak juga pendidik yang malas untuk belajar. Acuan materi pengelolaan keuangan desa secara khusus ada di Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 20 Tahun 2020. Keterbatasan pendidik dalam memahami materi tentunya akan menghambat pencapaian tujuan pembelajaran. Selain itu karena materi baru belum banyak yang menguasai materi tersebut sehingga belum maksimal dalam pembelajaran. Padahal ada kompetensi lanjutan yaitu penerapan pengelolaan keuangan desa. Jika guru belum memahami ruang lingkup pengelolaan desa, maka tidak dapat melakukan penerapan/praktik.

Pokok bahasan keuangan desa ada di dalam Permendagri Nomor 20 Tahun. Isi Permendagri tersebut adalah ruang lingkup pengelolaan keuangan desa, pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan desa, kegiatan yang dilakukan dalam pengelolaan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/APBdes, serta pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan desa (Mahmud *et al.*, 2020). Semua mekanisme ada di dalam peraturan tersebut sehingga tidak akan terjadi salah persepsi ataupun salah pelaporan. Akan tetapi memang dibutuhkan pemahaman secara mendalam dan komprehensif. Sehingga pengelolaan keuangan akan berjalan dengan lancar.

Berikut tingkat pemahaman guru akuntansi pada Kompetensi dasar pemahaman akuntansi lembaga pokok bahasan pengelolaan keuangan desa.

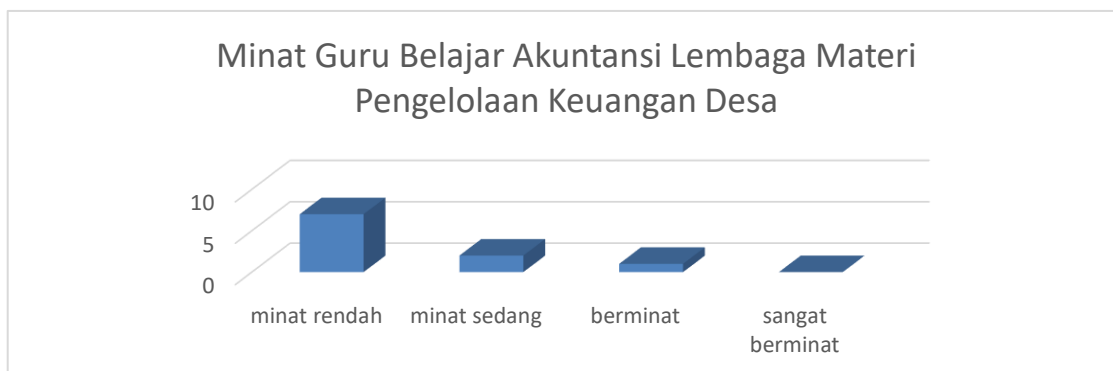


Gambar 1. Data kegiatan di SMK PGRI 2 Taman 2020

Pokok bahasan pengelolaan keuangan desa merupakan materi baru sehingga sebagian besar guru akuntansi belum memiliki pengetahuan dasar. Pengelolaan keuangan desa lahir dari Undang-Undang Tentang sDesa yang memberikan otonomi secara luas kepada desa untuk mengelola pemerintahan dan keuangannya. Secara resmi merupakan implementasi dari Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa (Triani and Handayani, 2018). Oleh karena itu, materi tentang keuangan desa benar-benar baru. Semua yang membutuhkan materi tersebut harus belajar secara mendalam dan komprehensif.

Selain itu, tidak semua guru memiliki keinginan untuk belajar akuntansi Lembaga. Hal tersebut karena mereka memiliki persepsi bahwa belajar materi yang baru membutuhkan proses yang lama dan panjang. Diperlukan usaha yang besar untuk belajar pokok bahasan yang baru 2018 (Susilowati and Latifah, 2016; Nurdian Susilowati *et al.*, 2020). Berikut minat guru akuntansi belajar akuntansi lembaga pokok bahasan pengelolaan keuangan desa. Minat merupakan perasaan tertarik, perhatian, dan hasrat yang dimiliki individu pada suatu hal, dan tanpa ada dorongan. Minat akan terpatri dan berkembang pada individu untuk mendapat dukungan lingkungan sekitar (Park, Paik and Koo, 2019; Ramanau, Hughes and Grayson, 2020). Dari minat akan terbentuk kemauan untuk belajar yang akan mencapai sebuah perolehan pengalaman. Factor penentu minat yang dominan yaitu dorongan individu, sosial, dan emosional (Handoyo, 2018; Hong, 2019). Minat

menjadi aspek utama dalam meningkatkan pengetahuan dan pengalaman individu sehingga perlu ditingkatkan. Berikut minat guru akuntansi SMK PGRI 2 Taman Kabupaten Pemalang belajar akuntansi Lembaga pokok bahasan pengelolaan keuangan desa.



Gambar 2. Data kegiatan belajar mengajar SMK PGRI 2 Taman

Oleh karena itu solusi untuk mengatasi masalah tersebut adalah pertama melakukan pelatihan pemahaman ruang lingkup pengelolaan keuangan desa dan penganggaran desa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/APBDes). Kedua, pemahaman kegiatan pemerolehan pendapatan, penggunaan belanja, dan pembiayaan desa. Selanjutnya dilakukan evaluasi pelatihan secara komprehensif sehingga dapat menyusun laporan kekayaan milik desa (LKMD). Guna mendukung dan mewujudkan profesionalitas guru, maka tim pengabdian masyarakat mengadakan peningkatan pemahaman akuntansi Lembaga pokok bahasan pengelolaan keuangan desa sehingga mempermudah guru dalam menyampaikan materi dan tujuan pembelajaran dapat tercapai.

## METODE PENERAPAN

Sebelum dilakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, tim pengabdian melakukan berbagai macam persiapan.

### 1. Persiapan

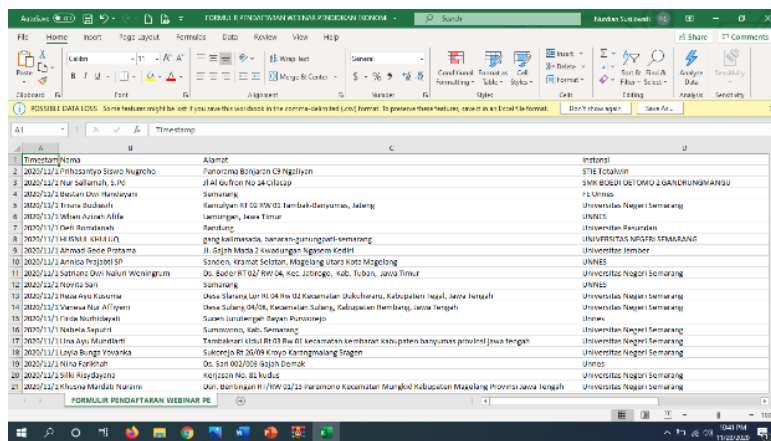
Pertama adalah melakukan koordinasi tim untuk penguatan materi dan kekompakan. Sehingga tujuan kegiatan dapat tercapai. Selain itu, juga wadah untuk menyamakan persepsi kegiatan pelatihan. Kedua yaitu melakukan koordinasi dengan Guru Akuntansi melalui MGMP Akuntansi SMK Kabupaten Pemalang untuk memastikan waktu pelaksanaan kegiatan pelatihan. Disamping itu juga menentukan materi pelatihan, sehingga benar-benar materi yang relevan dengan kebutuhan guru akuntansi. Ketiga adalah melakukan kesepakatan media virtual yang digunakan, yaitu menggunakan zoom meeting. Keempat, peserta mengisi link pendaftaran untuk memastikan guru yang ikut dalam pelatihan tersebut. Berdasarkan link pendaftaran ada sejumlah 143 peserta guru akuntansi SMK akan tetapi yang hadir dalam acara sebanyak 80 peserta.

The image shows a screenshot of a Google Forms registration page. The form title is "FORMULIR PENDAFTARAN WEBINAR PENDIDIKAN EKONOMI". Below the title, it specifies the event details: "WEBINAR CENTRE FOR ACCOUNTING EDUCATION STUDIES (CAES) JURUSAN PENDIDIKAN EKONOMI UNNES KAMIS, 19 NOVEMBER 2020". The form contains three input fields: "Name" (Short answer text), "Alamat" (Long answer text), and "Instansi" (Long answer text). The form is displayed on a computer screen with a Windows taskbar at the bottom showing the time as 10:37 PM on 11/20/2020.

Gambar 3. Formulir Pendaftaran

## 2. Pelaksanaan kegiatan pengabdian

Serangkaian kegiatan dilaksanakan dengan baik dan lancar. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 24 September 2020 pukul 08.30 sampai dengan pukul 11.30. pembicara dalam kegiatan pelatihan pertama adalah Dr. Amir Mahmud, S.Pd., M.Si. dengan topik konsep pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Pembicara kedua Nurdian Susilowati, S.Pd., M.Pd. dengan topik pengelolaan keuangan desa menggunakan Permendagri nomor 20 tahun 2018. Secara detail pengelolaan keuangan desa dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Berikut daftar presensi peserta.



Timestamp	Nama	Alamat	Instansi
2020/11/24	Mhd Nurrobbilillah	Perumahan Bontaroh C3 Hidayat	Instansi
2020/11/24	Fitri Sulistyanti, S.Pd	Jl. Alifur Rahman No. 40 Cilacap	STIE Fatahillah
2020/11/24	Bisnuh Dwi Handayani	Samarang	SMK IKIP QESIMO 2 GANDUNGNGAYU
2020/11/24	Fitria Nurhidayah	Kampung 03 02 RW 02 Tambak-Bayurmas, Jember	UIN Sunan
2020/11/24	Nurhasanah Alifia	Samarang, Jawa Timur	Universitas Negeri Semarang
2020/11/24	Dewi Renedesah	Randulung	Universitas Pasundan
2020/11/24	RISSA SALLA LILIA	gang kalimantan, barisan-gungga-samarang	UNIVERSITAS MUSIBI SEMARANG
2020/11/24	Almudi Sidiq Pratama	Jl. Gajah Mada 2, dusunggan Ngipon Kidul	Universitas Jember
2020/11/24	Annisa Pratiwi SP	Sindon, Kramat Selatan, Kabupaten Utara Kota Magelang	UNNES
2020/11/24	Sabrina Dwi Nurul Wicakram	Des. Bodo RT 02/ RW 04, Kec. Jatrogo, Kab. Tuban, Jawa Timur	UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2020/11/24	Novita Sari	Samarang	UNNES
2020/11/24	Hera Hira Kusuma	Desa Slangan Km 04 No 02 Kecamatan Dukuhrejo, Kabupaten Ngali, Jawa Tengah	Universitas Negeri Semarang
2020/11/24	Nurhasanah Alifia	Desa Sulang 04/08, Kecamatan Sulang, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah	Universitas Negeri Semarang
2020/11/24	Fitria Nurhidayah	Suani Jarumengah Bayan Purusarjo	Utama
2020/11/24	Nurhasanah Alifia	Samarang, kab. Semarang	Universitas Negeri Semarang
2020/11/24	Ulya Ayu Maulidati	Tembokari 03/01 RT 03 RW 01 Kecamatan Lembang Kabupaten Banyuwangi provinsi Jawa Tengah	Universitas Negeri Semarang
2020/11/24	Lilya Bunga Rizka	Sukorejo Rt 20/09 Krayo Karangmalang Engon	Universitas Negeri Semarang
2020/11/24	Nina Farhanah	Des. Sori 04/05 Bajah Demak	Unnes
2020/11/24	Rizka Nurhidayah	Kecamatan Ng. Bk. Budek	Universitas Negeri Semarang
2020/11/24	Nurhasanah Alifia	Des. Bantingan RT 1/ RW 02/22 Panomoro Kecamatan Mangkil Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah	Universitas Negeri Semarang

Gambar 4. Daftar Hadir Peserta

Pada sesi pertama dan kedua berjalan dengan lancar. Sesi selanjutnya adalah tanya jawab dan sharing pengalaman dengan peserta. Pertanyaan yang muncul adalah tentang pencatatan keuangan desa dan praktik riil bagi siswa SMK. Selama ini siswa hanya dibekali pengetahuan konsep dasar pendapatan, belanja, dan beban. Mereka belum sampai pada tahap pencatatan.

Kegiatan pengabdian dilakukan selama dua bulan yaitu September sampai Oktober 2020. Secara rinci tujuan, metode, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tim pengabdian terapkan adalah sebagai berikut:

### 1. Ceramah/Penyuluhan

Pada awal kegiatan tim pengabdian menerapkan metode penyuluhan. Tim pengabdian melakukan sosialisasi materi, maksud dan tujuan, fungsi serta kebermanfaatannya (Susilowati, N., dan Santoso, 2019). Karena kegiatan dilakukan pada masa pandemi, maka dilaksanakan secara virtual menggunakan zoom meeting.

### 2. Demonstrasi

Selanjutnya kegiatan penyampaian materi dilakukan dengan metode demonstrasi yakni melakukan pencatatan keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Secara seksama peserta memperhatikan penjelasan dari pembicara.

### 3. Pendampingan

Setelah dilakukan penyuluhan dan demonstrasi melalui webinar, selanjutnya adalah dilakukan pendampingan menggunakan WA Grup. Secara aktif guru-guru akuntansi melakukan sharing pengalaman dan diskusi materi praktik pengelolaan keuangan desa. mengoperasikan database asset milik

### 4. Evaluasi

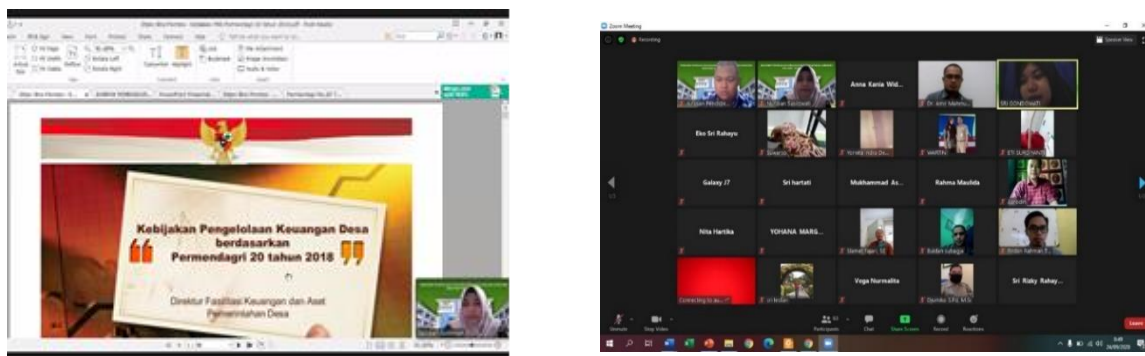
Setiap tahapan kegiatan mulai dari sosialisasi, penyuluhan, dan demonstrasi dilakukan sebuah evaluasi. Dalam pelaksanaan webinar yaitu melakukan pemahaman pengelolaan keuangan desa berupa konsep dan jenis pendapatan, belanja, pembiayaan serta pencatatannya dilakukan evaluasi berupa pengisian Latihan pencatatan keuangan. Dapat diketahui bahwa dari 80 peserta guru akuntansi, sebanyak 56 guru dapat menjawab dengan nilai 75. Selebihnya 24 guru mendapatkan nilai dibawah 70. Kegiatan evaluasi selanjutnya dilakukan Ketika pendampingan menggunakan WAG dimana guru sangat antusias dan semangat dalam belajar keuangan desa.

## HASIL DAN KETERCAPAIAN SASARAN

### 1. Pemahaman Pengelolaan Keuangan Desa

Guru akuntansi mulai paham perencanaan keuangan desa. Hal tersebut dibuktikan dengan antusiasme dan bertanya perihal keuangan desa saat pelatihan. Menurut permendagri No 20 tahun 2018 Pasal 71 ayat (1) dan (2) mendefinisikan Keuangan Desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan Kewajiban sebagaimana dimaksud menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan desa. Kades sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dan wakil pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan (Setyawan, Priyono and Iswanaji, 2018).

Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD yang memiliki kewenangan (a) menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa; (b) menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa; (c) melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa; (d) menetapkan PPKD; (e) menyetujui DPA, DPPA, dan DPA; (f) menyetujui RAK Desa; dan (g) menyetujui SPP.



Gambar 5. Sesi pemahaman materi dan tanya jawab

Sebagian kewenangan tersebut diberikan kepada Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) yaitu sekretaris desa, kaur, dan kasi. Kaur Desa melaksanakan fungsi kebendaharaan. Sedangkan Kasi meliputi kasi kesejahteraan, pembangunan, dan pelayanan (Arifin et al., 2020). Sedangkan pelaksanaannya dikoordinatori oleh Sekretaris Desa. Sekretaris desa memiliki tugas sebagai berikut.

- Melakukan koordinasi dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan APB Desa
- Berkoordinasi dalam menyusun rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa
- Berkoordinasi dalam menyusun rancangan peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa
- Berkoordinasi dalam menyusun rancangan peraturan kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa
- Berkoordinasi dalam tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD
- Mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.

Sedangkan tugas Kaur dan Kasi adalah sebagai berikut:

- Melakukan pembelanjaan keuangan desa sesuai pos atau bidangnya
- Melaksanakan semua anggaran yang telah ditetapkan dalam APB Desa dan Rencana Anggaran Biaya (RAB)
- Mengendalikan semua kegiatan yang ada di dalam APB Desa
- Menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya
- Menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
- Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.

## 2. Pemahaman Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan

Sumber-sumber pendapatan desa yaitu (1) pendapatan asli desa; (2) dana desa (DD) yang berasal dari APBN; (3) bagian dari pajak dan retribusi kabupaten/kota; (4) alokasi dana desa (ADD) paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima kab/kota dikurangi DAK dan Pemerintah dapat menunda dan/atau mengurangi dana perimbangan jika kab/kota tidak mengalokasikan ADD; (5) bantuan keuangan dari APBD Provinsi/kabupaten/kota; (6) hibah dan sumbangan pihak ketiga, dan (7) pendapatan lain-lain. Sumber-sumber pendapatan tersebut digunakan untuk pengeluaran belanja pemerintah desa sesuai dengan klasifikasi yaitu digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah desa, pemberdayaan masyarakat desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, serta penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak (Watts *et al.*, 2019).

Adapun jenis belanja yaitu belanja pegawai, belanja barang/jasa, belanja modal, dan belanja tak terduga (Susilowati, Herdiani and Widhiastuti, 2018). Keempat jenis belanja ini harus berdasarkan klasifikasi penggunaan belanja tersebut sehingga tidak ada yang keliru. Sedangkan dua jenis pembiayaan desa yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Contoh dari penerimaan pembiayaan adalah pembentukan dana cadangan. Sedangkan contoh pengeluaran pembiayaan adalah penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk modal usaha setiap unit usaha dengan ketentuan pembagian profit sesuai dengan kesepakatan bersama. Semuanya disahkan dalam musyawarah desa (musdes). Musdes dihadiri oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), perangkat desa, tokoh masyarakat, perwakilan perempuan, karangtaruna, dan pengurus BUMDes.

## 3. Ketercapaian Sasaran

Berdasarkan hasil evaluasi kegiatan pengabdian diperoleh evaluasi pemahaman pengelolaan keuangan desa dan konsep pendapatan, belanja, dan beban seperti berikut ini.

Tabel 1. Respon guru pada materi

Nomor.	Indikator Penilaian	Rentang Skor			
		4	3	2	1
1	Definisi dan Klasifikasi Pendapatan	78	2	0	0
2	Definisi dan klasifikasi belanja	77	3	0	0
3	Definisi dan klasifikasi pembiayaan	76	4	0	0
4	Prinsip-prinsip pengelolaan keuangan desa	80	0	0	0
5	Pendekatan Kas dalam pencatatan keuangan desa	70	10	0	0
6	Pelaporan keuangan	63	17	0	0

Tabel tersebut menunjukkan tingkat pehaman peserta pada materi yang disampaikan. Lebih dari 60 guru menyampaikan bahwa mereka paham terhadap materi. Artinya kurang lebih sebesar 75% jumlah peserta paham terhadap materi.

## KESIMPULAN

Kegiatan pelatihan pemahaman pengelolaan keuangan desa dan pemahaman konsep pendapatan, belanja, dan pembiayaan berjalan dengan lancar. Guru sangat semangat belajar ruang lingkup keuangan desa, penyuluhan tentang konsep pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Minat dan dorongan guru dalam belajar pokok bahasan baru sangat tinggi, hal tersebut dibuktikan dengan antusias dalam diskusi dan tanya jawab. Selanjutnya, guru dapat memahami ruang lingkup pengelolaan keuangan desa dan fungsinya. Konsep pendapatan, belanja, dan pembiayaan dengan teliti dapat dipahami dan dipraktikkan cara penerapannya. Basis akuntansi yang digunakan adalah basis kas, sehingga selama ini pencatatan keuangannya masih sangat sederhana pengabdian ini memberikan kontribusi pada pengembangan kompetensi professional guru sehingga guru dapat responsif, adaptif, dan kompetitif dalam proses pembelajaran di kelas. Kemauan guru untuk belajar akan mempermudah pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Musyawarah Guru Mata Pelajaran Akuntansi SMK Kabupaten Pematang dan LP2M UNNES yang telah mendanai kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, B. *et al.* (2020). Village fund , village-owned-enterprises , and employment : Evidence from Indonesia', *Journal of Rural Studies*. Elsevier Ltd, 79(September), pp. 382–394. doi: 10.1016/j.jrurstud.2020.08.052.
- Handoyo, S. (2018). Study Motivation, Academic Performance and Commitment Career in Accounting Profession', *Journal of Education and Learning (EduLearn)*, 12(3), p. 366. doi: 10.11591/edulearn.v12i3.8078.
- Hong, J. (2019). by cognitive anxiety , online learning self-efficacy', *Educational Technology Research and Development*. Springer US, 67(3), pp. 597–615. doi: 10.1007/s11423-018-9628-4.
- Mahmud, A. *et al.* (2020). The Contribution of Village Fund Management for Creating More Prosperous Society : An Empirical Study at Central Java', *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 12(11), pp. 357–371.
- Nurdian Susilowati *et al.* (2020). Investigating Self-Regulated Learning Differences Based on Gender, Scholarship, and Student's Housing', *Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis (JPEB)*, 8(1), pp. 25–33. doi: 10.21009/jpeb.008.1.3.
- Park, Y. H., Paik, T. Y. and Koo, J. H. (2019). Effect of student activity participation on accounting education', *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 5(3), pp. 1–11. doi: 10.3390/JOITMC5030040.
- Ramanau, R., Hughes, J. and Grayson, P. (2020). Introducing Computer- Marked Tests In An Online Financial Accounting Course : Patterns In Academic Performance And Approaches To Assessment Design Ruslan Ramanau , Jane Hughes and Paul Grayson', *Advances in Accounting Education: Teaching and Curriculum Innovations*, 24, pp. 195–214. doi: 10.1108/S1085-462220200000024018.
- Setyawan, S., Priyono, N. and Iswanaji, C. (2018). Development Model of E-Budgeting and E-Reporting System on the Management of Village Fund Finance', *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 9(1), pp. 92–99. doi: 10.15294/jda.v9i1.12000.
- Susilowati, N., dan Santoso, A. (2019). IbM Siswa Akuntansi SMKN 1 Salatiga', *ABDIMAS*, 23(2), pp. 128–133.
- Susilowati, N., Herdiani, A. and Widhiastuti, R. (2018). Village Community Participation Model in Village Funds Management to Exteriorize the Accountability', *KnE Social Sciences*, 3(10), p. 1024. doi: 10.18502/kss.v3i10.3190.
- Susilowati, N. and Latifah, L. (2016). The Implementation Effect Blended Learning Approach on Accounting Knowledge and Generic Skills', *Journal of Accounting and Business Education*, 1(1), p. 66. doi: 10.26675/jabe.v1i1.6730.
- Triani, N. N. A. and Handayani, S. (2018). Praktik Pengelolaan Keuangan Dana Desa', *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(1), pp. 136–155. doi: 10.18202/jamal.2018.04.9009.
- Watts, J. D. *et al.* (2019). Village transfers for the environment: Lessons from community-based development programs and the village fund', *Forest Policy and Economics*. Elsevier, 108(January), p. 101863. doi: 10.1016/j.forpol.2019.01.008.